

Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional dalam Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Fara Adeliya Putri¹, Muhammad Rafa Sani², Salwa Mai Azura³, Lara Gustiawati⁴,
Mulia Suryani⁵

^{1,2,3,4,5} Matematika, Universitas PGRI Sumatera Barat

e-mail: muliasuryani@gmail.com

Abstrak

Sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia unggul guna mewujudkan visi "Generasi Emas Indonesia 2045". Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan, pemerataan akses, kualitas tenaga pendidik, serta relevansi kurikulum terhadap kebutuhan zaman masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pendidikan nasional dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang bangsa. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan pendidikan yang relevan dalam dua dekade terakhir. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi berbagai inovasi seperti penerapan Kurikulum Merdeka dan digitalisasi pembelajaran, kesenjangan pendidikan antarwilayah serta rendahnya kompetensi literasi dan numerasi peserta didik masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.

Kata kunci: *Sistem Pendidikan, Generasi Emas, Evaluasi, Kurikulum, Literasi*

Abstract

The national education system has a strategic role in forming superior human resources to realize the vision of the "Golden Generation of Indonesia 2045". However, challenges in policy implementation, equal access, quality of educators, and the relevance of the curriculum to the needs of the times are still major obstacles. This study aims to evaluate the effectiveness of the national education system in supporting the achievement of the nation's long-term development goals. The methods used are literature studies and analysis of relevant education policies in the last two decades. The evaluation results show that although there have been various innovations such as the implementation of the Merdeka Curriculum and digitalization of learning, the gap in education between regions and the low literacy and numeracy competencies of students are still major challenges. Therefore, sustainable reforms are needed that involve collaboration between the government, schools, communities, and the business world to create an adaptive, inclusive, and future-oriented education ecosystem.

Keywords : *Education System, Golden Generation, Evaluation, Curriculum, Literacy*

PENDAHULUAN

Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan visi Generasi Emas 2045, sebuah harapan besar di mana bangsa ini memiliki sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing global. Salah satu fondasi utama pencapaian visi tersebut adalah sistem pendidikan nasional yang adaptif dan berkualitas. Pendidikan berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membentuk karakter, meningkatkan literasi dan numerasi, serta membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21. Namun, dalam praktiknya, sistem pendidikan nasional masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari sisi kebijakan, implementasi, maupun pemerataan mutu antarwilayah (Samadhinata, 2022). Menurut pandangan saya, gagasan Generasi Emas 2045 mencerminkan cita-cita luhur bangsa untuk keluar dari jebakan negara

berpendapatan menengah. Akan tetapi, realisasi cita-cita tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor yang konsisten dan berkelanjutan, terutama dalam memperkuat infrastruktur pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Salah satu hambatan utama yang terus menjadi sorotan adalah rendahnya capaian literasi dan numerasi siswa Indonesia. Meskipun data Asesmen Nasional (AN) 2024 menunjukkan adanya peningkatan, yaitu 70,03% siswa telah mencapai standar minimum literasi dan 67,94% untuk numerasi, capaian ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Sekolah-sekolah di daerah tertinggal dan terpencil masih tertinggal jauh dalam hal pencapaian kompetensi dasar ini. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masalah pemerataan mutu pendidikan masih sangat krusial dan erat kaitannya dengan keterbatasan sumber daya pendidikan di berbagai daerah (Kemendikbudristek, 2022). Saya berpendapat bahwa persoalan disparitas mutu pendidikan merupakan tantangan mendasar yang harus segera diatasi melalui intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan daerah. Upaya peningkatan literasi dan numerasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pembaruan kurikulum, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas guru, penguatan sarana prasarana, serta pendampingan berkelanjutan bagi satuan pendidikan di wilayah tertinggal.

Salah satu faktor utama yang memperkuat ketimpangan tersebut adalah persoalan kekurangan guru. Data terkini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kekurangan sekitar 1,3 juta guru, yang sebagian besar merupakan guru honorer dengan status belum tersertifikasi dan kompetensi terbatas. Kesejahteraan guru yang rendah juga berdampak langsung terhadap kualitas pengajaran. Di tengah keterbatasan ini, pemerintah mendorong reformasi pendidikan melalui penerapan Kurikulum Merdeka, yang bertujuan meningkatkan fleksibilitas belajar serta menumbuhkan kreativitas peserta didik (BSKAP Kemendikbudristek, 2024). Namun, efektivitas reformasi ini tidak bisa dilepaskan dari kesiapan para pendidik dalam memahami dan mengimplementasikannya (Suroyo, et al., 2024). Peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan reformasi pendidikan. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, melainkan juga sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator bagi peserta didik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengedepankan kebijakan afirmatif dalam rekrutmen, peningkatan kompetensi, serta pemberian insentif bagi guru, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan yang sesungguhnya.

Kurikulum Merdeka memang telah diterapkan pada lebih dari 70% sekolah sejak 2021, dan hasil awalnya menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari kendala. Beban administratif yang tinggi serta kurangnya pelatihan bagi guru menjadi hambatan utama. Tidak semua guru memiliki pemahaman mendalam tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada siswa. Selain itu, adanya resistensi terhadap perubahan kurikulum di sebagian sekolah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan perlu diiringi dengan penguatan kapasitas dan perubahan budaya kerja di tingkat sekolah (Faraasyatul'Alam, et al., 2025). Menurut pendapat saya, implementasi Kurikulum Merdeka akan mencapai efektivitas optimal apabila pemerintah dan pemangku kepentingan menyediakan skema pelatihan komprehensif, mentoring intensif, dan supervisi berkelanjutan. Selain itu, pengurangan beban administratif bagi guru harus segera dilakukan agar para pendidik dapat lebih fokus pada pengembangan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tanpa dukungan tersebut, tujuan Kurikulum Merdeka untuk menghasilkan generasi yang merdeka belajar hanya akan menjadi slogan semata.

Transformasi lain yang signifikan dalam sistem pendidikan nasional adalah penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Nasional. Kebijakan ini dirancang untuk mengevaluasi kualitas pendidikan secara menyeluruh, termasuk kemampuan literasi, numerasi, karakter peserta didik, serta lingkungan belajar. Meski demikian, pelaksanaannya masih terkendala oleh kesiapan infrastruktur, terutama di sekolah-sekolah yang belum memiliki komputer dan jaringan internet memadai. Kendala teknologi ini menyebabkan ketimpangan baru, yang dapat memperburuk kesenjangan capaian antarwilayah jika tidak segera diatasi (Dunn, 2023). Saya memandang bahwa kebijakan penggantian Ujian Nasional merupakan langkah progresif yang relevan dengan paradigma evaluasi pembelajaran masa kini, yang menekankan aspek kompetensi dan karakter.

Namun demikian, kesiapan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam implementasinya, karena tanpa dukungan fasilitas teknologi yang merata, kebijakan ini justru berpotensi memperkuat ketidaksetaraan dan memarginalkan peserta didik di daerah tertinggal.

Masalah ketimpangan pendidikan tidak hanya terjadi pada aspek evaluasi dan pembelajaran, tetapi juga pada penyediaan bahan ajar yang relevan dan kontekstual. Buku pelajaran yang digunakan di banyak sekolah belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Pendekatan literasi dan numerasi kontekstual masih jarang ditemukan dalam materi ajar, dan minimnya alat peraga serta perpustakaan menambah hambatan dalam proses pembelajaran. Ketimpangan infrastruktur ini semakin memperlebar jurang mutu pendidikan antara sekolah-sekolah di kota besar dan di daerah pinggiran (Huda, et al., 2025). Menurut saya, pengembangan bahan ajar kontekstual yang disesuaikan dengan karakteristik lokal merupakan strategi penting untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendekatan pedagogi kritis yang menekankan relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga mampu mendorong lahirnya generasi yang berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap lingkungannya.

Selain dari aspek kelembagaan, peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung pendidikan juga masih tergolong rendah. Partisipasi orang tua dalam proses belajar anak belum optimal, sehingga lingkungan rumah belum mampu menjadi ruang belajar yang kondusif. Akibatnya, motivasi belajar peserta didik pun menjadi lemah, terutama di wilayah dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Budaya belajar yang seharusnya dibangun bersama oleh sekolah dan masyarakat belum terbentuk secara kuat (Samadhinata, 2022). Saya berpendapat bahwa penguatan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan fondasi esensial dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik. Pendidikan seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah semata, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif orang tua sebagai mitra utama dalam mendampingi proses belajar anak. Dengan demikian, tercipta kesinambungan antara pendidikan formal di sekolah dan pendidikan nonformal di rumah, yang pada akhirnya akan memperkuat kualitas karakter dan kompetensi peserta didik.

Lebih jauh lagi, sistem pendidikan nasional masih menghadapi tantangan serius dalam aspek inklusivitas. Peserta didik dari kelompok marginal, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan yang setara. Berdasarkan data Asesmen Nasional 2024, sebanyak 96% siswa dari kelompok rentan tidak mencapai standar kecakapan numerasi minimum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya adaptif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik, dan masih memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan responsif dalam kebijakan serta pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi berbagai kebijakan dan dinamika dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Generasi Emas 2045. Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan nasional, hasil asesmen pendidikan, serta publikasi ilmiah dan artikel dari lembaga resmi seperti Kementerian Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), BPS, dan UNESCO.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber relevan yang terbit dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, untuk menjamin keterkinian informasi. Beberapa sumber utama yang digunakan antara lain: Rapor Pendidikan Indonesia, hasil Asesmen Nasional, dokumen implementasi Kurikulum Merdeka, serta laporan-laporan dari Kemendikbudristek dan lembaga pendidikan internasional. Selain itu, digunakan pula artikel-artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi yang membahas isu literasi, numerasi, pemerataan pendidikan, dan reformasi kurikulum.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tren, dan permasalahan dalam sistem pendidikan nasional. Hasil analisis digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan

pendidikan dalam mempersiapkan generasi unggul Indonesia. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang kredibel dan terpercaya (Nafiurrohman & Ilyas, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional merupakan suatu kesatuan yang terstruktur dan terpadu, mencakup berbagai komponen pendidikan seperti kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, sarana prasarana, evaluasi, serta lembaga penyelenggara pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Suroyo, et al., 2024).

Pendidikan nasional di Indonesia diselenggarakan melalui dua jalur utama, yaitu jalur pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal mencakup jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, sedangkan pendidikan nonformal meliputi pendidikan luar sekolah seperti kursus, pelatihan, dan pendidikan masyarakat. Selain itu, terdapat pula jalur pendidikan informal, yaitu pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketiga jalur tersebut saling melengkapi dan mendukung dalam rangka menciptakan sistem pendidikan yang holistik dan inklusif (Oktaviani, et al., 2024).

Ciri khas dari sistem pendidikan nasional Indonesia adalah asas keadilan, keterjangkauan, dan pemerataan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang adil bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Namun, dalam praktiknya, prinsip ini masih menemui banyak tantangan seperti disparitas kualitas antarwilayah, kurangnya tenaga pendidik yang profesional, dan keterbatasan infrastruktur (Hidayat, 2023).

Sistem pendidikan nasional juga mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan zaman. Salah satu bentuk inovasinya adalah penerapan Kurikulum Merdeka yang mulai diluncurkan sejak 2021. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, fleksibel, serta mendorong penguatan karakter dan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Transformasi ini menjadi langkah penting dalam menyesuaikan sistem pendidikan nasional dengan tantangan global dan teknologi yang terus berkembang (Supriadi, et al., 2024).

Dalam mewujudkan Generasi Emas 2045, sistem pendidikan nasional harus mampu menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Sistem ini harus tidak hanya memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Untuk itu, evaluasi dan pembaruan terus-menerus terhadap kebijakan, pelaksanaan, serta hasil pendidikan menjadi keharusan agar sistem pendidikan nasional benar-benar relevan, adaptif, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional (Nafiurrohman & Ilyas, 2024).

Kebijakan Pendidikan Nasional Terkini

Kebijakan pendidikan nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai transformasi strategis guna menjawab tantangan abad ke-21 dan mempersiapkan Generasi Emas 2045. Salah satu kebijakan utama yang menjadi sorotan adalah implementasi Kurikulum Merdeka, yang mulai diperkenalkan sejak 2021 sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Kurikulum ini mengedepankan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, dan penguatan karakter, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada guru dalam menyesuaikan materi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Menurut Kemendikbudristek (2023), Kurikulum Merdeka diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas, pemikiran kritis, serta kemandirian belajar siswa.

Di samping kurikulum, pemerintah juga menerapkan Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional. Asesmen ini tidak hanya mengukur kemampuan kognitif seperti literasi dan numerasi, tetapi juga mencakup survei karakter dan survei lingkungan belajar. AN dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas proses pendidikan di satuan pendidikan, bukan hanya menilai hasil akhir peserta didik. Hal ini menjadi paradigma baru dalam evaluasi pendidikan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perbaikan proses pembelajaran. Namun, implementasi AN masih menghadapi kendala teknis dan kesiapan infrastruktur, terutama di daerah terpencil dan sekolah dengan keterbatasan akses teknologi (Kurniawan, et al., 2024).

Selain itu, digitalisasi pendidikan menjadi agenda strategis lainnya yang terus didorong pemerintah. Melalui platform seperti Merdeka Mengajar, Rumah Belajar, dan program bantuan TIK (teknologi informasi dan komunikasi), Kemendikbudristek berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis digital. Digitalisasi ini juga diarahkan untuk mendukung fleksibilitas dan akses sumber belajar yang lebih luas, terlebih bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Meski demikian, kesenjangan digital masih menjadi tantangan besar, mengingat tidak semua sekolah memiliki infrastruktur dan SDM yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal (Wati., et al., 2023).

Dalam konteks penguatan tenaga pendidik, kebijakan rekrutmen guru ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) menjadi salah satu upaya mengatasi kekurangan guru secara nasional. Pemerintah juga menyelenggarakan program pendidikan guru penggerak, pelatihan kompetensi berkelanjutan, serta pengembangan komunitas belajar. Tujuannya adalah menciptakan guru yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang reflektif dan kolaboratif. Meski kebijakan ini menunjukkan arah yang positif, tantangan seperti kesejahteraan guru honorer, ketimpangan distribusi, dan beban administratif tetap perlu diatasi secara serius.

SIMPULAN

Evaluasi terhadap sistem pendidikan nasional menunjukkan bahwa berbagai kebijakan terkini seperti Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, digitalisasi pendidikan, dan peningkatan kualitas guru merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses, kualitas SDM, serta kesiapan infrastruktur masih perlu dibenahi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). *Visi Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- BSKAP Kemendikbudristek. (2024). *Rapor Pendidikan Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Dunn, W. N. (2023). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faraasyatul'Alam, G., Wiyono, B. B., Burhanuddin, B., Batita, M. S. R., & Purnawirawan, O. (2025). Peran Teknologi Informasi dalam Dunia Pendidikan: Manajemen Efektif Menuju Generasi Emas 204. *Proceedings Series of Educational Studies*, 92-99.
- Huda, N., Nuril, M. P. P. D. H., & Huda, M. P. (2025). Peran Evaluasi dalam Mengukur Keberhasilan Pendidikan Berbasis Akhlak: Menyongsong Generasi Emas 2045.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemendikbudristek. (2023). *Laporan Hasil Asesmen Nasional Tahun 2023*. Jakarta: Pusat Asesmen Pendidikan.
- Kurniawan, B., Rahmawati, F. P., & Ghufro, A. (2024). Dinamika Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Tinjauan Literatur Sistematis. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(3), 1672–1678.
- Nafurrohman, A., & Ilyas, I. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Program Pendidikan Kesetaraan. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 5(2), 804–814.

- OECD. (2023). PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning Outcomes. Paris: OECD Publishing.
- Oktaviani, S., Jumriah, J., Meisella, R. S., Susilo, S., & Kalukar, V. J. (2024). Inovasi Asesmen Formatif Non Paper-Based dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 8(4), 3445–3454.
- Samadhinata, I. M. D. (2022). Efektifitas sistem pendidikan dalam mempengaruhi terwujudnya generasi emas 2045. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(1), 19-26.
- Saryanto, T. K. Harahap, A. M. Basyari, dkk. (2023). Pentingnya Penguatan Pendidikan Karakter di Masa Merdeka Belajar. *Media Sains Indonesia*.
- Satibi Hidayat (edit.). (2023). Pendidikan Karakter Anak Sesuai Pembelajaran Abad ke-21. Sonpedia Publishing.
- Supriadi, T., Yatim, D., Nofika, I., Handayani, S. G., & Jalinus, N. (2024). Pengembangan Kurikulum Merdeka dalam Satuan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3222–3230.
- Suroyo, K., Harwindito, B., Supentri, dkk. (2024). Pendidikan Karakter. *Penamuda Media*.
- UNESCO. (2022). Education in a Post-COVID World: Nine Ideas for Public Action. Paris: UNESCO Publishing.
- Wati, D. S. S., Aziz, A., & Fitri, A. Z. (2023). Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi. *Journal of Education Research*, 4(3), 1021–1030